

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk dapat hidup layak dalam lingkungannya. Kemiskinan kadang juga diartikan tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Perencanaan pengentasan kemiskinan, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa kemiskinanakan selalu berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan bersama sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pihak masyarakat dan swasta untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Perlunya campur tangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena permasalahan kemiskinan yang terjadi di satu daerah dengan daerah lain tidaklah sama, setiap daerah memiliki karakteristik dan keadaan sosial budaya yang berbeda beda dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan pemerintah tingkat daerah yang dianggap paling mengetahui karakteristik dan kondisi kemiskinan yang ada di daerahnya masing-masing.(Novandric, 2015)

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya pada pertanian agroekosistem persawahan adalah produktivitas tenaga kerja, kurangnya aset

pada pendidikan, pelatihan, keterbatasan akses sumber daya produktif dan membatasi produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan petani dan tingginya tingkat kemiskinan pada petani khususnya pada agroekosistem persawahan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya pada agroekosistem persawahan. Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, dan kondisi lingkungan Indonesia pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin yang ada memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan (Pratama, 2014). Adapun penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
2020	271,9	27,55	10,1
2021	273,8	27,54	10,0
2022	275,77	26,36	9,5
2023	278	25,90	9,3
Total	1.099,47	107,35	38,9
Rata-rata	274,87	26,84	9,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 – 2023 mengalami penurunan dari persentase tahun 2020 sebanyak 10,1% dan pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk miskin sebesar 10,0 %, pada tahun 2022

persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,5%, dan pada tahun 2023 persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 10,1% menjadi 9,3%. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, efektivitas program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta investasi dalam infrastruktur. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut.

Kemiskinan di seluruh negeri berkaitan erat dengan pertanian dan perikanan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor utama yang menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduknya terutama di daerah pedesaan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, teknologi dan pasar seringkali menjebak petani dan nelayan miskin dalam lingkaran kemiskinan. Kurangnya modal investasi, rendahnya produktivitas karena keterbatasan teknologi dan fluktuasi harga yang tidak stabil membuat mereka rentan terhadap kemiskinan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki lanskap geografis dan sosial yang beragam, wilayah ini terdapat kekayaan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi prevalensi kemiskinan di provinsi tersebut. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah ketimpangan distribusi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor

pertanian dan perikanan, yang menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat, terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah tertentu semakin membatasi peluang ekonomi dan melanggengkan kesenjangan sosial, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
2020	9.700.000	776,860	8,0
2021	9.100.000	784,980	8,6
2022	9.200.000	777,440	8,4
2023	9.300.000	788,850	8,5
Total	37.300.000	3.128,13	33,5
Rata-rata	9.320.000	782,030	8,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023.

Berdasarkan Tabel 2, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan turun pada tahun 2020 yaitu sebesar 776,86 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 784,98 ribu jiwa kemudian turun pada tahun 2022 sebesar 777,44 ribu jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 788,85 ribu jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19. Faktor-faktor lokal seperti bencana alam atau ketidakstabilan politik juga berperan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan.

Masyarakat agroekosistem persawahan adalah sekumpulan masyarakat yang hidup hidup saling tolong menolong dan saling bergantung dengan membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya alam, yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. Ekosistem sawah merupakan salah satu jenis **ekosistem buatan manusia** yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jadi, masyarakat agroekosistem persawahan adalah komunitas yang terlibat dalam kegiatan pertanian di sekitar lahan sawah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan memanfaatkan ekosistem buatan ini secara berkelanjutan

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang juga memiliki masalah kemiskinan petani persawahan adalah kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu memiliki wilayah persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi kemiskinan petani di Kabupaten Luwu dan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Adapun persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Luwu, 2015-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2018	2,36	0,55
2019	2,71	0,72
2020	2,12	0,49
2021	1,77	0,46
2022	1,90	0,39
Total	10,86	2,12
Rata-rata	2,17	0,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. 2023.

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Luwu dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan tetapi hal tersebut bukan menjadi acuan utama karena kemiskinan tetap ada di wilayah persawahan. begitupun dengan indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Luwu yang mengalami penurunan walaupun pada Tahun 2019 sempat mengalami kenaikan sebesar 0,72 tapi Hal ini tidak menjadi acuan utama, dan setelah tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu disebabkan oleh berbagai solusi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan faktor-faktor tersebut berperan dalam memperbaiki keadaan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu.

Perkembangan ekonomi tidak terjadi secara serempak di semua sektor dan wilayah. Beberapa tempat tumbuh dengan cepat, sedangkan ditempat lain tumbuh dengan sangat lambat. Perbedaan latar belakang kemiskinan juga memerlukan

penanganan yang berbeda pula. Suatu daerah yang memiliki penduduk miskin karena sumber daya alamnya yang sedikit tentu akan berbeda penanganannya dengan daerah yang miskin karena sumber daya manusianya yang rendah, penanganan kemiskinan untuk daerah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan ataupun daerah pantai dengan pegunungan. Penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Permasalahan yang dihadapi adalah data mengenai konsentrasi kemiskinan tiap wilayah tidak dapat dipantau penyebarannya sehingga sulit untuk menyalurkan bantuan baik berupa bantuan dana maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya. Kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun sepertinya belum pernah berkurang begitu banyak, khususnya masyarakat yang hidup di pedesaan. Kebanyakan masyarakat dari pedesaan tidak memiliki pendidikan dan keahlian khusus, sehingga hanya mengandalkan bidang pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Gunawan dan Irawan, 2021).

Hal ini dapat kita lihat pada agroekosistem persawahan luas lahan persawahan ternyata tidak mampu membuat taraf hidup petani meningkat, sehingga masih banyak petani sawah yang mengalami kesulitan dalam menjalani hidup, dalam hal ini adalah kesejahteraan ekonomi. Banyak petani sawah di desa-desa berada dalam garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer dan juga karena terjadinya krisis ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan. Inilah yang membuat para petani sawah semakin kewalahan dalam memperbaiki perekonomian.ada beberapa hal yang

menjadi strategi yang dapat di terapkan untuk menaggulangi kemiskinan pada petani sawah. Salah satunya pada upaya yang diterapkan oleh pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perpres tersebut percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga (Gunawan dan Irawan, 2021).

Kemiskinan petani juga menjadi masalah serius khususnya di wilayah persawahan Indonesia. Petani agroekosistem persawahan seringkali menghadapi masalah seperti kekeringan dan ahli fungsi lahan. Selain itu, petani agroekosistem persawahan juga menghadapi tantangan dalam hal produktivitas karena wilayah agroekosistem persawahan sering kali dipengaruhi oleh bencana. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Petani agroekosistem persawahan di Sulawesi Selatan biasanya menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian. Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang juga memiliki masalah kemiskinan petani agroekosistem persawahan adalah Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu memiliki wilayah agroekosistem yang cukup luas dan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi kemiskinan petani pada agroekosistem persawahan di Kabupaten Luwu dan wilayah persawahan lainnya di Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Model Penanggulangan Kemiskinan Petani Pada Tipe Agroekosistem Persawahan Di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana model tingkat kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Masalah – masalah yang dirumuskan di atas masing – masing memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

2. Menganalisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
3. Menganalisis model tingkat kemiskinan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia.
2. Bagi petani, dapat memberikan manfaat dalam hal ini informasi terkait dengan model penanggulangan kemiskinan pada tipe agroekosistem persawahan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
3. Bagi pemerintah daerah dan dinas yang terkait, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mengacu pada penanggulangan kemiskinan pada tipe agroekosistem persawahan
4. Bagi pembaca, sebagai bahan kajian guna menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.